BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pembangunan adalah usaha manusia dalam mencapai kesejahteraan dan merupakan tugas negara untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kesinambungan pembangunan. Pembangunan di segala bidang perlu ditingkatkan guna mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam hal pembangunan, pusat tidak lepas tangan terhadap pembangunan yang ada di daerah yang menjadi wewenang daerah, dengan kata lain bahwa pemerintah pusat dan daerah masih ada jalinan hubungan. Jalinan ini salah satunya adalah dalam hal system keuangan seperti dalam UU RI NO. 22 Tahun 1999, tentang pemerintah daerah, presiden dalam pertimbangannya di awal undang-undang tersebut menyebutkan bahwa untuk menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, perlu adanya penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta

potensi dan keaneka ragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Seperti telah diketahui bahwa sejak diberlakukannya undang-undang tentang otonomi daerah pada awal tahun 2001, Otonomi Daerah (Otda) secara bertahap dan serentak telah diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan pemerintah ini sendiri mengundang pernyataan pro dan kontra oleh berbagai kalangan dari individu, golongan bahkan lembaga atau instansi yang terimbas dengan Otonomi Daerah. Dari pihak yang menyetujui atau yang mendukung menyatakan kesiapannya dalam melaksanakan otda. Hal ini dikarenakan daerah yang akan menjalankan otda merasa optimis dengan kemampuan sumber dayanya baik sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Bagi yang tidak mendukung pelaksanaan otda ini dirasakan terlalu tergesa-gesa sehingga potensi sumber dayanya belum begitu siap, bisa dilaksanakan namun haruslah dengan tahapan-tahapan sesuai dengan kondisi kesiapannya.

Kebijakan yang dikeluarkan, mau tidak mau haruslah dijalankan sesuai dengan peraturan pemerintah. Bagi daerah yang bisa dikatakan sudah mempunyai kesiapan untuk itu sudah memulai dengan perencanaan dan penggalian sumber-sumber daya yang ada. Otonomi daerah yang menuntut tiap daerah untuk menggali dan mengelola sendiri sumber dayanya tanpa campur tangan pemerintah pusat secara penuh yang kesemuanya itu akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah, sumber pendapatan daerah perlu ditingkatkan dengan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah yang menekankan supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan tepat dengan diberikan sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat tidak semua sumber pembiayaandapat diberikan kepada daerah, maka daerah diwajibkan menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan daerah, pasal 79 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas

a. Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi:
    1. Hasil Pajak Daerah
    2. Hasil Retribusi Daerah
    3. Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
    4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
b. Dana Perimbangan
c. Pinjaman Daerah
d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan demikian, dari sumber-sumber pendapatan diatas yang telah disebutkan, maka Pajak Daerah merupakan salah satu sumber-sumber pendapatan

daerah. Pajak daerah pengelolaannya dilakukan oleh daerah melalui dinas daerah dan dapat dilakukan terus menerus.

Di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sumber-sumber pendapatan daerah menggunakan format yang agak berlainan, namun secara garis besar pada pokoknya sama. Dibawah ini akan disajikan contoh tabel tentang jenis sumber pendapatan daerah di Kabupaten Sukoharjo untuk tahun anggaran 2002-2003.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2002-2003
(Dalam Rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun 2002	Tahun 2003
1.	Pajak Daerah	9.232.657.881	8.658.380.000
2.	Retribusi Daerah	7.059.199.000	7.295.352.000
3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	271.983.000	468.900.000
4.	Lain-lain PAD yang sah	1.199.371.000	2.851.000.000
	Jumlah PADS	**17.763.210.881**	**19.274.632.000**
5.	Bagi hasil pajak/bukan pajak	12.028.022.000	14.819.505.000
6.	Dana alokasi umum	205.280.000.000	253.710.000.000
7.	Dana alokasi khusus	0	5.800.000.000
8.	Bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari propinsi	0	14.412.309.000
9.	Bagi hasil retribusi dan sumbangan	0	113.439.600
	Jumlah Dana Perimbangan	**217.308.022.000**	**288.855.253.600**
	Lain-lain Pendapatan yang sah	**17.318.842.000**	**21.249.199.000**
	Bagian urusan kas	**20.487.330.165,69**	**0**
	Jumlah seluruhnya	**272.985.820.165,69**	**329.379.084.600**

Sumber : BPKD Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan. Kabupaten Sukoharjo secara terus menerus berupaya keras untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah bagi kabupaten itu sendiri sehingga dengan adanya peningkatan penerimaan pajak daerah akan mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan akan memberikan kontribusi pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pembangunan, maka semakin banyak fasilitas maupun jasa yang perlu disediakan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk menunjang kegiatan perekonomian.

Adapun 6 jenis Pajak Daerah yang tercantum dalam dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (sebelumnya Undang-Undang No. 6 Tahun 1983) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, yaitu:

1. Pajak Hotel dan Restoran
2. Pajak Reklame
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Penerangan Jalan Umum
5. Pajak Bahan Galian C
6. Pajak air Bawah Tanah Dan Air Permukaan.

Mengingat anggaran yang harus dicukupi oleh Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun yang semakin meningkat, maka perlu diupayakan untuk

meningkatkan jumlah penerimaan yang semakin meningkat pula. Dengan meningkatnya jumlah penerimaan, diharapkan Realisasi Pajak Daerah dapat meningkat yang selanjutnya dapat memenuhi kebutuhan keuangan yang dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang mengelola tujuh (7) pajak daerah, secara pasti mengoptimalkan sumber pendapatan tersebut. Untuk mengetahui contoh realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2002-2003, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2
Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2002-2003
(Dalam Rupiah)

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2002	Tahun 2003
1.	Pajak Hotel dan Restoran	119.077.757	133.047.788
2.	Pajak hiburan	40.279.510	44.000.000
3.	Pajak reklame	285.290.075	575.000.000
4.	Pajak penerangan jalan	8.290.432.189	7.900.880.000
5.	Pajak pengolahan dan pengembalian Galian golongan c	12.035.000	12.000.000
6.	Pajak pemanfaatan ABT dan APT	505.543.350	0
7.	Pajak parkir	0	4.000.000
	Total	**9.232.657.881**	**8.658.380.000**

Sumber : BPKD Kabupaten Sukoharjo

Dari Tabel 1.2 diatas, diketahui bahwa penerimaan Pajak Hotel dan Restoran mengalami kenaikan dari tahun 2002 sebesar Rp119.077.757,00 menjadi Rp133.047.788,00 pada tahun 2003. namun untuk penerimaan pajak

hotel dan restoran tergantung dengan jumlah wisatawan atau pengunjung per tahun yang datang sehingga bisa mengalami kenaikan atau penurunan.

Bertolak dari arti pentingnya peranan penerimaan pendapatan pajak daerah, maka perlu diadakan penelitian mengenai pajak daerah yang dipungut Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu khusus mengenai peranan pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah di Kabupaten Sukoharjo.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang dikemukakan maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Restoran (PHR) terhadap Pajak Daerah pada Kabupaten Sukoharjo tahun 1994-2004?.
2. Seberapa besar tingkat efisiensi dan tingkat efektifitas penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada Kabupaten Sukoharjo tahun 1994-2004?.
3. Seberapa besar prospek penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada Kabupaten Sukoharjo .

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menghitung besarnya peranan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pajak Daerah yang merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo tahun 1994-2004.
2. Untuk mengukur besarnya tingkat efektifitas dan efisiensi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pajak Daerah pada Kabupaten Sukoharjo tahun 1994-2004.

3. Untuk memprediksi prospek penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada Kabupaten Sukoharjo lima tahun kedepan.

1.4. Manfaat Penelitian :

1. Mendapat tambahan pengetahuan yang berharga,serta untuk memperoleh gelar sarjana.
2. Sebagai informasi pemerintah daerah dalam kebijaksanaan keuangan yang ada hubungannya dengan penerimaan pajak.
3. Bagi pemerintah daerah dapat memberikan masukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa tengah.

1.5.2. Jenis dan Sumber Data

1.5.2.1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang bersifat *time series* yang merupakan data tahunan. Data sekunder adalah data yang diterbitkan oleh organisasi yang bukan merupakan pengolahnya (Anto Dajan, 1986, 19) atau data yang sudah tersedia karena sebelumnya sudah diteliti oleh lembaga atau organisasi tertentu, data berupa data *time series* dari tahun 1994-2004.

1.5.2.2. Sumber Data

Data yang digunakan bersumber dari kantor BPS Kabupaten Sukoharjo, kantor BPKD Kabupaten Sukoharjo, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Sukoharjo.

1.5.3. Definisi Operasional

a. Pajak

Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak progresif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang. Pemungutannya dapat dilaksanakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukan penggunaannya, dalam satuan rupiah.

b. Pajak Daerah

Iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan usaha kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah di ukur dalam satuan rupiah

c. Pajak Hotel dan Restoran

Pajak hotel dan restoran adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoran yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo melalui pengusaha hotel dan rumah makan dari para penginap, pembeli/pemesan

makanan dan minuman sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku diukur dalam satuan rupiah.

d. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu komponen daripada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pembangunan dan melancarkan jalannya roda pemerintahan, dalam satuan rupiah.

e. Jumlah penduduk

Diartikan sebagai jumlah total penduduk Kabupaten Sukoharjo dari tahun 1994-2004.

f. Jumlah wisatawan

Adalah jumlah pengunjung yang mengunjungi Kabupaten Sukoharjo untuk keperluan berlibur, rekreasi, olahraga, bisnis, dan lain-lain.

1.5.4. Alat Analisis

1.5.4.1. Analisis Kontribusi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui peranan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pajak Daerah atau besarnya indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak Hotel dan Restoran (PHR) terhadap Pajak Daerah. Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah digunakan rumusan berikut:

$$\text{Kontribusi PHR} = \frac{\text{Realisasi PHR}}{\text{Realisasi pajak daerah}} \times 100\ \%$$

1.5.4.2. Analisis Efisiensi

Analisis ini digunakan untuk mengukur biaya pemungutan pajak hotel dan restoran terhadap realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran (PHR) atau untuk mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya memungut pajak bersangkutan .(Devas: 1989 : 146). Biaya adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk merealisasikan penerimaan pajak tersebut. Untuk mengukur tingkat efisiensi pajak hotel dan restoran digunakan rumusan:

Rumusan analisis efisiensi:

$$\text{Efisiensi PHR} = \frac{\text{Biaya pungutan PHR}}{\text{Realisasi penerimaan PHR}} \times 100\ \%$$

Pajak Hotel dan Restoran dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai dibawah 100 %.

1.5.4.3. Analisis Efektifitas

Analisis ini digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungut dengan potensi hasil pajak itu, dengan anggapan semua wajib pajak membayar pajak masing-masing dan membayar seluruh pajak terhutang masing-masing (Devas : 1989 : 144)

Efektifitas dapat diformulasikan:

$$\text{Efektifitas PHR} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PHR}}{\text{Target penerimaan PHR}} \times 100\ \%$$

Pajak Hotel dan Restoran dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai lebih dari 100 %.

1.5.4.4. Prediksi Peramalan *Trend Linier*

Trend adalah rata-rata perubahan dalam jangka panjang. Digunakan untuk mengetahui seberapa besar jumlah penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2004-2009.

Persamaan dengan metode *The Least Square* (Nugroho Hadi Yuwono, 1993) adalah:

$Y = a + bx$

Dimana:

Y = Nilai *Trend* (PHR)

a = Konstanta/intercept Y

b = *Slope* atau lereng garis *trend*

x = waktu (tahun)

Mencari nilai a dan b dari persamaan diatas dapat dicari dengan rumus :

$$a = \frac{\Sigma y}{n}$$

$$b = \frac{\Sigma xy}{\Sigma x^2}$$

Dimana:

Σy = Jumlah nilai *trend* (dalam rupiah)

n = Jumlah data

Σxy = Jumlah perkalian antara waktu dikalikan nilai *trend*

Σx^2 = Jumlah waktu yang dikuadratkan

1.6. Sistem Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Metode Penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan dan referensi awal dalam penelitian.

BAB III LANDASAN TEORI

Berisi Tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian.

BAB IV GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

Berisi gambaran umum mengenai daerah penelitian yang terdiri dari keadaan geografis, keadaan demografi, penerimaan pajak hotel dan restoran dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sukoharjo.

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menganalisis dan membahas peranan pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah, analisis efektifitas dan efisiensi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah, analisis prospek pajak hotel dan restoran dimasa yang akan datang dan keterbatasan penelitian.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan serta implikasi dari hasil penelitian.